



LAPORAN EVALUASI RUMAH DATA KEPENDUDUKAN
DAN INFORMASI KELUARGA (RUMAH DATAKU)
TARGET PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)

Tahun
2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Evaluasi Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu) Target Proyek Prioritas (Pro PN) Tahun 2022. Laporan ini menggambarkan hasil evaluasi kegiatan Rumah DataKu Pro PN selama Tahun 2022.

Dengan adanya laporan evaluasi ini, kami berharap dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kualitas Pengelolaan Rumah DataKu dalam rangka mewujudkan data kependudukan dan informasi keluarga yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat mikro khususnya yang menjadi sasaran dalam proyek prioritas nasional.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Ditrenduk yang telah berperan dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari seluruh pihak untuk kesempurnaan laporan ini.

Direktur Perencanaan Pengendalian
Penduduk

Dr. Munawar Asikin, S.Si, M.SE

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Target dan Anggaran Pro PN Tahun 2022.....	4
BAB II METODOLOGI.....	7
2.1 Pendekatan Evaluasi	7
2.2 Variabel dan Indikator Evaluasi.....	7
2.3 Tahapan Evaluasi	8
BAB III EVALUASI RUMAH DATAKU PRO PN	10
3.1 Rekapitulasi Pelaporan Rumah DataKu Pro PN	10
3.2 Legalitas Rumah DataKu	13
3.3 Sumber Anggaran Dalam Pengelolaan Rumah DataKu Pro PN.....	15
3.4 Pengelolaan Rumah DataKu Pro PN	16
3.5 Capaian Realisasi Anggaran dan Target Rumah DataKu Pro PN.....	24
BAB IV PENUTUP.....	27
LAMPIRAN.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pagu Awal, Pagu Refocusing dan Target.....	4
Tabel 3.1 Rekapitulasi Target dan Cakupan Inputan K0 di New Siga	10
Tabel 3.2 Rekapitulasi Klasifikasi Rumah DataKu Pro PN.....	11
Tabel 3.3 Legalitas Rumah DataKu Pro PN	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pejabat yang mengeluarkan SK pendirian dan pengukuhan.....	15
Gambar 3.2 Persentase Sumber Anggaran Dalam Pengelolaan Rumah DataKu Pro PN	16
Gambar 3.3 Pengurus Rumah DataKu Pro PN	17
Gambar 3.4 Penyajian Data Rumah DataKu Pro PN	18
Gambar 3.5 Sarana dan Prasarana Rumah DataKu Pro PN	19
Gambar 3.6 Keikutsertaan Ketua Dalam Orientasi/Pelatihan Rumah DataKu Pro PN	20
Gambar 3.7 Keikutsertaan Kader Dalam Orientasi/Pelatihan Rumah DataKu Pro PN	20
Gambar 3.8 Ketersediaan Data di Rumah DataKu Pro PN	21
Gambar 3.9 Pemanfaatan Rumah DataKu Pro PN	22
Gambar 3.10 Pemanfaat Rumah DataKu Pro PN	23
Gambar 3.11 Pagu dan Realisasi Anggaran Serta Capaian Rumah DataKu Pro PN Tahun 2022	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pejabat Penetapan SK Pendirian dan Pengukuhan Pengurus Rumah DataKu Pro PN.....	29
Lampiran 2. Rekapitulasi sumber dana pengelolaan Rumah DataKu Pro PN.....	30
Lampiran 3. Jumlah Pengurus Rumah DataKu Pro PN.....	32
Lampiran 4. Keikutsertaan Pelatihan/Orientasi dasar oleh Ketua Rumah DataKu Pro PN	33
Lampiran 5. Keikutsertaan Pelatihan/Orientasi dasar oleh Kader Rumah DataKu Pro PN	34
Lampiran 6. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah DataKu Pro PN berdasarkan Provinsi.....	35
Lampiran 7. Ketersediaan Data di Rumah DataKu Pro PN berdasarkan Provinsi ...	37
Lampiran 8. Kegiatan Pemanfaatan Data di Rumah DataKu Pro PN berdasarkan Provinsi	39
Lampiran 9. Pemanfaat Data di Rumah DataKu Pro PN berdasarkan Provinsi	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan yang menjadi titik sentral, modal utama dan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan berkelanjutan. Dimana hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Oleh karena itu diperlukan data kependudukan dan informasi keluarga yang valid, terpercaya dan terkini sebagai dasar perencanaan dan intervensi pembangunan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga sebagai bagian dari pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam bagian data dan informasi. Upaya tersebut dilakukan melalui registrasi vital, sensus, dan survei, baik kepada individu maupun keluarga.

Tersedianya data dan indikator pembangunan yang terkini, valid dan terpercaya merupakan kebutuhan penting bagi pelaksanaan intervensi pembangunan diseluruh tingkatan wilayah. Pada tingkat agregat pelaksanaan desentralisasi akan sangat membantu proses "*bottom up*". Hal itu disebabkan karena pemerintah pusat telah mendelegasikan sebagian besar kewenangannya dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan ke tingkat kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat desa seiring dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketersediaan data dan informasi andal yang disediakan menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam melakukan perencanaan untuk membangun desa/kelurahan. Data dan informasi yang berkualitas menjadi sangat penting tidak

hanya untuk perencanaan pembangunan, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan maupun kebijakan di desa/kelurahan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada; sehingga tujuan pembangunan, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat tercapai. Selain itu, perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dengan menggunakan data yang berkualitas dan terkini akan memberikan arah yang lebih seksama menuju sasaran.

Untuk memenuhi kebutuhan data tersebut di desa/kelurahan, maka dibentuklah Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga yang selanjutnya disingkat Rumah DataKu. Rumah DataKu yang merupakan kelompok kegiatan masyarakat yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi kependudukan di tingkat mikro untuk memenuhi kebutuhan akan data dan informasi keluarga dalam pembangunan di Kampung KB pada khususnya dan desa/kelurahan pada umumnya. Diharapkan Rumah DataKu akan menjadi pusat data dan informasi kependudukan di wilayah tingkat desa, selain itu dapat juga sebagai penyedia data basis bagi intervensi pembangunan serta menjadi instrumen pendidikan data kependudukan bagi masyarakat tentang pentingnya data dan aspek kependudukan dalam pembangunan.

Sesuai dengan Renstra BKKBN dan RPJMN 2020-2024, Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk memiliki peran strategis dalam pencapaian pembangunan prioritas nasional (3) yaitu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing, dalam kegiatan prioritas percepatan cakupan administrasi kependudukan dengan pengembangan data dan informasi kependudukan yang akurat, lengkap dan tepat waktu dengan indikator program adalah persentase Rumah DataKu Paripurna yang terbentuk di Kampung KB. Pentingnya penyediaan data yang valid, terpercaya, dan terbarukan terutama dalam bidang kependudukan di level mikro, ditrenduk diarahkan untuk dapat mengawal kegiatan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) tahun 2022 melalui Rumah DataKu Paripurna yang difasilitasi di Kampung KB Percontohan, dengan target 2.266 dan alokasi anggaran sebesar 9,021,722,000 yang diperuntukan di seluruh provinsi Indonesia setelah mengalami *Refocusing* atau pemotongan.

Mengingat bahwa Rumah DataKu menjadi pusat integrasi data di tingkat desa/kelurahan dan menjadi salah satu capaian target program Pro PN maka diperlukan sebuah evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Rumah Dataku baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Evaluasi terhadap pelaksanaan Rumah DataKu dapat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan pengelolaan Rumah Dataku maupun dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan data yang valid, terpercaya dan selalu terbarukan serta analisis kependudukan dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah desa/kelurahan.

Rumah Data Kependudukan pada dasarnya dibentuk untuk meningkatkan tata kelola data, terutama di desa atau kampung. Keberadaan data di Rumah DataKu Kependudukan terintegrasi dengan sumber data lain, data kepemilikan jamban keluarga, data balita kurang gizi atau teridentifikasi stunting, data penduduk menurut tingkat pendidikan, pekerjaan dan lainnya, yang kesemuanya dapat dimanfaatkan untuk intervensi pembangunan. Kualitas data diharapkan akan semakin baik, karena data tersebut dikumpulkan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

1.2 Tujuan

a. Tujuan Umum

Tersedianya evaluasi Rumah DataKu Pro PN untuk menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kualitas Pengelolaan serta Manajemen Data dalam rangka mewujudkan data kependudukan dan informasi keluarga yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di desa/kelurahan.

b. Tujuan Khusus

1. Mengetahui cakupan pembentukan Rumah DataKu Pro PN serta klasifikasi per Provinsi;
2. Mengetahui kepemilikan legalitas/SK pendirian dan pengukuhan pengurus, pengurus, orientasi, kepemilikan sarana dan prasarana, ketersediaan data,

penyajian data, pemanfaatan serta pemanfaat data pada Rumah DataKu Pro PN;

3. Memberikan masukan bagi perbaikan kualitas pengelolaan serta manajemen data pada Rumah DataKu Pro PN;
4. Menemukan kendala atau hambatan dalam pengembangan dan pengelolaan Rumah DataKu Pro PN.

1.3 Target dan Anggaran Pro PN Tahun 2022

Target Rumah DataKu Paripurna yang menjadi Proyek Prioritas Nasional tahun 2022 adalah sebanyak 2.266 yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dikarenakan pada tahun 2022 Indonesia masih mengalami pandemic Covid-19 maka pagu anggaran yang dikhususkan untuk pencapaian target Pro PN mengalami *Refocusing* atau pemotongan.

Secara keseluruhan total *Refocusing* terhadap pagu anggaran sebesar 25,78% namun pemotongan untuk tiap-tiap provinsi berbeda disesuaikan dengan capaian realisasi dan targetnya. Provinsi dengan potongan tertinggi lebih dari 70% yaitu Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat, sedangkan provinsi yang tidak dipotong adalah Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta , Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Maluku Dan Papua Barat.

Tabel 1.1 Pagu Awal, Pagu *Refocusing* dan Target

No	Provinsi	PAGU AWAL	PAGU REFOCUSING		Target RDK Paripurna Pro PN
			Pagu <i>Refocusing</i>	Persentase	
1	ACEH	1,472,000,000	11,800,000	0.80%	92
2	SUMATERA UTARA	2,768,000,000	-	0.00%	173
3	SUMATERA BARAT	2,032,000,000	439,740,000	21.64%	127
4	RIAU	288,000,000	69,680,000	24.19%	18
5	JAMBI	1,408,000,000	286,598,000	20.35%	88
6	SUMATERA SELATAN	896,000,000	401,340,000	44.79%	56
7	BENGKULU	800,000,000	100,185,000	12.52%	50

No	Provinsi	PAGU AWAL	PAGU REFOCUSING		Target RDK Paripurna Pro PN
			Pagu Refocusing	Persentase	
8	LAMPUNG	630,000,000	5,060,000	0.80%	45
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	224,000,000	-	0.00%	14
10	KEPULAUAN RIAU	378,000,000	2,009,000	0.53%	21
11	DKI JAKARTA	420,000,000	-	0.00%	30
12	JAWA BARAT	2,170,000,000	418,350,000	19.28%	155
13	JAWA TENGAH	2,800,000,000	2,264,148,000	80.86%	200
14	DI YOGYAKARTA	868,000,000	245,632,000	28.30%	62
15	JAWA TIMUR	4,900,000,000	1,084,661,000	22.14%	350
16	BANTEN	672,000,000	2,980,000	0.44%	48
17	BALI	532,000,000	89,035,000	16.74%	38
18	NUSA TENGGARA BARAT	1,040,000,000	733,825,000	70.56%	65
19	NUSA TENGGARA TIMUR	756,000,000	55,590,000	7.35%	42
20	KALIMANTAN BARAT	896,000,000	382,482,000	42.69%	56
21	KALIMANTAN TENGAH	448,000,000	102,400,000	22.86%	28
22	KALIMANTAN SELATAN	320,000,000	130,224,000	40.70%	20
23	KALIMANTAN TIMUR	832,000,000	-	0.00%	52
24	SULAWESI UTARA	480,000,000	94,790,000	19.75%	30
25	SULAWESI TENGAH	224,000,000	23,205,000	10.36%	14
26	SULAWESI SELATAN	1,152,000,000	418,945,000	36.37%	72
27	SULAWESI TENGGARA	1,445,000,000	648,136,000	44.85%	85
28	GORONTALO	624,000,000	123,965,000	19.87%	39
29	SULAWESI BARAT	720,000,000	-	0.00%	45
30	MALUKU	432,000,000	420,000,000	2.78%	24

No	Provinsi	PAGU AWAL	PAGU REFOCUSING		Target RDK Paripurna Pro PN
			Pagu Refocusing	Persentase	
31	MALUKU UTARA	720,000,000	227,662,000	31.62%	40
32	PAPUA	1,273,000,000	659,280,000	51.79%	67
33	PAPUA BARAT	380,000,000	-	0.00%	20
	Grand Total	35,000,000,000	9,021,722,000	25,78%	2266

BAB II METODOLOGI

2.1 Pendekatan Evaluasi

Pendekatan yang digunakan dalam mengevaluasi Rumah DataKu Pro PN 2022 adalah dengan pendekatan metode *desk review* dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui aplikasi New Siga dan E-Monev Bappenas untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis dilakukan untuk melihat pola pengelolaan Rumah DataKu Kependudukan dan Informasi Keluarga khususnya yang menjadi anggaran Proyek Prioritas Nasional tahun anggaran 2022.

2.2 Variabel dan Indikator Evaluasi

Variabel dan Indikator dalam melakukan evaluasi Rumah DataKu meliputi:

No	Variabel	Indikator
1	Jumlah	Jumlah Rumah DataKu
2	Klasifikasi	Berdasarkan hasil pembobotan indikator Klasifikasi Rumah DataKu
3	Legalitas	Surat Keputusan (SK) Pendirian dan Pengukuhan Pengurus Rumah DataKu
4	Yang Mengeluarkan SK	Yang mengeluarkan SK: 1. Kepala Desa/Lurah 2. Camat 3. Ka. PD KB 4. Bupati/Walikota 5. Gubernur
5	Sumber Anggaran	Sumber anggaran penyelenggaraan Rumah DataKu terdiri dari: 1. APBN 2. APBD 3. ADD 4. Swadaya 5. CSR 6. Lainnya
6	Struktur Pengurus	Jumlah Pengurus Rumah DataKu yang terdiri dari : 1. Ketua 2. Kader
7	Pelatihan/Orientasi	Keikutsertaan Ketua dan Kader Rumah DataKu dalam Orientasi yang terdiri dari : 1. Orientasi Pengelolaan Rumah DataKu

No	Variabel	Indikator
		2. Orientasi Pengolahan Data 3. Orientasi Analisis Data
8	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana Rumah DataKu yang terdiri dari : 1. Papan Nama 2. Papan Data 3. Buku Data 4. Jaringan Internet 5. Komputer 6. Printer 7. Pojok Kependudukan 8. Lainnya
9	Kepemilikan Data	Kepemilikan data yang terdiri dari : 1. Kuantitas 2. Kualitas 3. Mobilitas 4. Pembangunan Keluarga 5. Adminduk 6. Perlindungan Sosial 7. Potensi Desa
10	Penyajian Data	Penyajian Data terdiri dari : 1. Papan Data 2. Buku Data
11	Pemanfaatan Data	Pemanfaatan Data terdiri dari : 1. Perencanaan 2. Intervensi 3. Penelitian 4. Lainnya
12	Pemanfaat Data	Pemanfaat Data yang terdiri dari : 1. Pemerintah 2. Swasta 3. Akademisi 4. Lainnya

2.3 Tahapan Evaluasi

Tahapan evaluasi Rumah DataKu dengan target Pro PN tahun 2022 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengentrian data yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi melalui aplikasi New Siga pada bulan Januari-Desember 2022.
2. Tabulasi dan Analisis Data dilakukan di bulan Desember 2022.
3. Penulisan Laporan dilakukan pada bulan Desember 2022.

Rumah DataKu yang menjadi target Pro PN tahun 2022 mengisi formulir K0 yang ada dalam aplikasi New Siga. Aplikasi New SIGA merupakan pembaharuan dari aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) yang berbasis web (*web-based*) untuk dapat menghasilkan data dan informasi keluarga yang berkualitas. Aplikasi ini digunakan sebagai pelaporan data.

Inti dari evaluasi pelaporan Rumah DataKu Pro PN tahun anggaran 2022 adalah melakukan analisis terhadap hasil input dalam formulir K0 yang ada dalam aplikasi New Siga untuk selanjutnya dilakukan review dan analisis terhadap indikator dalam output serta pengelompokan klasifikasi Rumah DataKu Pro PN.

BAB III
EVALUASI RUMAH DATAKU PRO PN

3.1 Rekapitulasi Pelaporan Rumah DataKu Pro PN

Pelaporan formulir K0 Rumah DataKu Pro PN melalui New Siga sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Rekapitulasi Target dan Cakupan Inputan K0 di New Siga

No	Provinsi	Target RDK Paripurna Pro PN	K0 New Siga Pro PN	
1	ACEH	92	97	107%
2	SUMATERA UTARA	173	173	100%
3	SUMATERA BARAT	127	129	102%
4	RIAU	18	18	100%
5	JAMBI	88	91	103%
6	SUMATERA SELATAN	56	56	100%
7	BENGKULU	50	50	100%
8	LAMPUNG	45	45	100%
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	14	14	100%
10	KEPULAUAN RIAU	21	21	100%
11	DKI JAKARTA	30	30	100%
12	JAWA BARAT	155	157	101%
13	JAWA TENGAH	200	102	51%
14	DI YOGYAKARTA	62	62	100%
15	JAWA TIMUR	350	358	102%
16	BANTEN	48	48	100%
17	BALI	38	38	100%
18	NUSA TENGGARA BARAT	65	66	102%
19	NUSA TENGGARA TIMUR	42	45	107%
20	KALIMANTAN BARAT	56	32	57%
21	KALIMANTAN TENGAH	28	28	100%
22	KALIMANTAN SELATAN	20	26	130%
23	KALIMANTAN TIMUR	52	52	100%

No	Provinsi	Target RDK Paripurna Pro PN	K0 New Siga Pro PN	
24	SULAWESI UTARA	30	33	110%
25	SULAWESI TENGAH	14	13	93%
26	SULAWESI SELATAN	72	76	106%
27	SULAWESI TENGGARA	85	85	100%
28	GORONTALO	39	34	87%
29	SULAWESI BARAT	45	46	102%
30	MALUKU	24	24	100%
31	MALUKU UTARA	40	48	120%
32	PAPUA	67	67	100%
33	PAPUA BARAT	20	20	100%
Grand Total		2266	2184	96,38%

Data Per 31 Desember 2022

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa sampai 31 Desember 2022 dari total 2.266 target Rumah DataKu Paripurna yang menjadi target dalam anggaran Pro PN Tahun 2022, terdapat 2.184 atau 96,38% Rumah DataKu yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah menginputkan K0 registrasi dalam New Siga. Terdapat 4 Provinsi yang masih belum memasukkan semua target Rumah DataKu Pro PN ke dalam New Siga, diantaranya Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Tabel 3.2 Rekapitulasi Klasifikasi Rumah DataKu Pro PN

No	Provinsi	Klasifikasi			Jumlah Pro PN	Target Paripurna PRO PN
		Sederhana	Lengkap	Paripurna		
1	ACEH	0	0	97	97	92
2	SUMATERA UTARA	0	0	173	173	173
3	SUMATERA BARAT	15	2	112	129	127
4	RIAU	2	0	16	18	18
5	JAMBI	5	1	85	91	88
6	SUMATERA SELATAN	0	0	56	56	56
7	BENGGKULU	0	0	50	50	50

No	Provinsi	Klasifikasi			Jumlah Pro PN	Target Paripurna PRO PN
		Sederhana	Lengkap	Paripurna		
8	LAMPUNG	0	0	45	45	45
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0	0	14	14	14
10	KEPULAUAN RIAU	0	0	21	21	21
11	DKI JAKARTA	0	0	30	30	30
12	JAWA BARAT	13	17	127	157	155
13	JAWA TENGAH	33	3	66	102	200
14	DI YOGYAKARTA	0	0	62	62	62
15	JAWA TIMUR	0	0	358	358	350
16	BANTEN	0	0	48	48	48
17	BALI	0	0	38	38	38
18	NUSA TENGGARA BARAT	48	1	17	66	65
19	NUSA TENGGARA TIMUR	42	1	2	45	42
20	KALIMANTAN BARAT	25	0	7	32	56
21	KALIMANTAN TENGAH	0	0	28	28	28
22	KALIMANTAN SELATAN	15	0	11	26	20
23	KALIMANTAN TIMUR & KALTARA	4	0	48	57	52
24	SULAWESI UTARA	0	0	33	33	30
25	SULAWESI TENGAH	5	0	8	13	14
26	SULAWESI SELATAN	0	0	76	76	72
27	SULAWESI TENGGARA	26	9	50	85	85
28	GORONTALO	25	1	8	34	39
29	SULAWESI BARAT	0	0	46	46	45
30	MALUKU	9	0	15	24	24
31	MALUKU UTARA	3	0	45	48	40
32	PAPUA	14	1	52	67	67
33	PAPUA BARAT	2	0	18	20	20
Grand Total		286	36	1862	2184	2266

Data Per 31 Desember 2022

Dari hasil input seluruh indikator dalam K0 yang ada dalam aplikasi New Siga kemudian dilakukan penghitungan pengelompokan Rumah DataKu agar terlihat Rumah DataKu mana saja yang sudah memenuhi target menjadi paripurna. Rumah DataKu dengan Klasifikasi Paripurna adalah tahapan paling tinggi dari pengembangan Rumah DataKu, secara garis besar pelaksanaan Rumah DataKu pada klasifikasi paripurna adalah sebagai berikut: 1) Memiliki SK Pengukuhan dan struktur lengkap; 2) Mengikuti orientasi lengkap; 3) Memiliki lebih dari 2 jenis sarana dan prasarana; 4) Data yang dimiliki oleh Rumah DataKu lebih dari 3 jenis data; 5) Penyajian data lengkap; 6) Data di Rumah DataKu *stakeholder* untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dari tabel 3.2 menunjukkan bahwa dari total 2.266 target Rumah DataKu Paripurna yang telah menjadi target Pro PN tahun 2022, ada 1.862 Rumah DataKu yang dikategorikan dalam klasifikasi paripurna, 36 Rumah DataKu dalam klasifikasi lengkap, dan 286 Rumah DataKu dalam klasifikasi sederhana. Dari total target sebesar 2.266 pada tahun 2022, hanya sekitar 82,17% yang masuk dalam kategori paripurna, masih ada 14,21% lagi yang menjadi beban tugas untuk menjadi Rumah DataKu Paripurna.

Dari total 34 Provinsi, baru 19 provinsi yang telah memenuhi seluruh target Rumah DataKu Paripurna tahun 2022, sedangkan 14 provinsi lain masih belum tercapai keseluruhan target paripurna. Oleh karena itu, target Pro PN di tahun 2022 yang belum tercapai paripurna akan menjadi target terhutang yang harus dijadikan paripurna di tahun berikutnya.

3.2 Legalitas Rumah DataKu

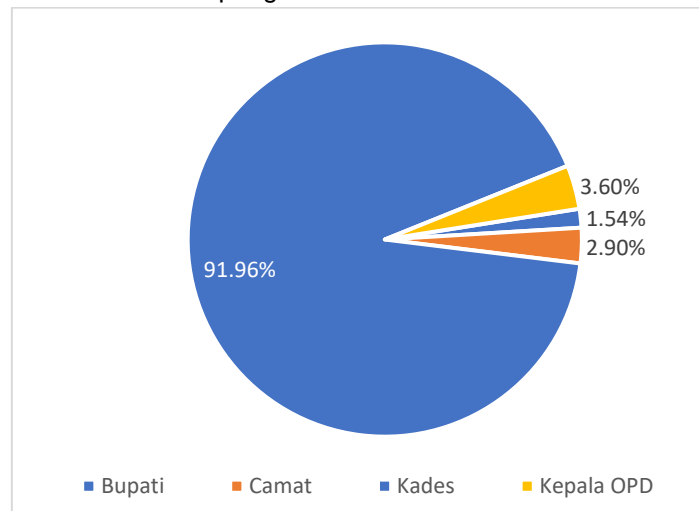
Pemenuhan aspek legalitas Rumah DataKu menjadi salah satu intervensi pengembangan Rumah DataKu yang bentuknya berupa penerbitan SK (Surat Keputusan) pendirian Rumah DataKu. Terbitnya surat keputusan yang dikeluarkan untuk legalitas pendirian Rumah DataKu minimal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah. Dari tabel 3.3 mengenai bentuk legalitas Rumah DataKu Pro PN tahun 2022, sebanyak 2.139 Rumah DataKu yang tersebar di seluruh Indonesia yang menjadi target Pro PN tahun 2022 sudah memiliki legalitas dalam

pendirian Rumah DataKu dalam bentuk SK, dan ada 45 Rumah DataKu yang tersebar di 9 provinsi masih belum memiliki legalitas dalam bentuk SK.

Tabel 3.3 Legalitas Rumah DataKu Pro PN

No	Provinsi	Memiliki SK	Tidak Memiliki SK
1	ACEH	97	0
2	SUMATERA UTARA	173	0
3	SUMATERA BARAT	126	3
4	RIAU	18	0
5	JAMBI	91	0
6	SUMATERA SELATAN	56	0
7	BENGKULU	50	0
8	LAMPUNG	45	0
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	14	0
10	KEPULAUAN RIAU	21	0
11	DKI JAKARTA	30	0
12	JAWA BARAT	157	0
13	JAWA TENGAH	99	3
14	DI YOGYAKARTA	62	0
15	JAWA TIMUR	358	0
16	BANTEN	48	0
17	BALI	38	0
18	NUSA TENGGARA BARAT	59	7
19	NUSA TENGGARA TIMUR	33	12
20	KALIMANTAN BARAT	24	8
21	KALIMANTAN TENGAH	28	0
22	KALIMANTAN SELATAN	26	0
23	KALIMANTAN TIMUR	52	0
24	SULAWESI UTARA	33	0
25	SULAWESI TENGAH	12	1
26	SULAWESI SELATAN	76	0
27	SULAWESI TENGGARA	85	0
28	GORONTALO	34	0
29	SULAWESI BARAT	46	0
30	MALUKU	24	0
31	MALUKU UTARA	45	3
32	PAPUA	64	3
33	PAPUA BARAT	15	5
Grand Total		2139	45

Gambar 3.1 Pejabat yang mengeluarkan SK pendirian dan pengukuhan pengurus Rumah DataKu Pro PN

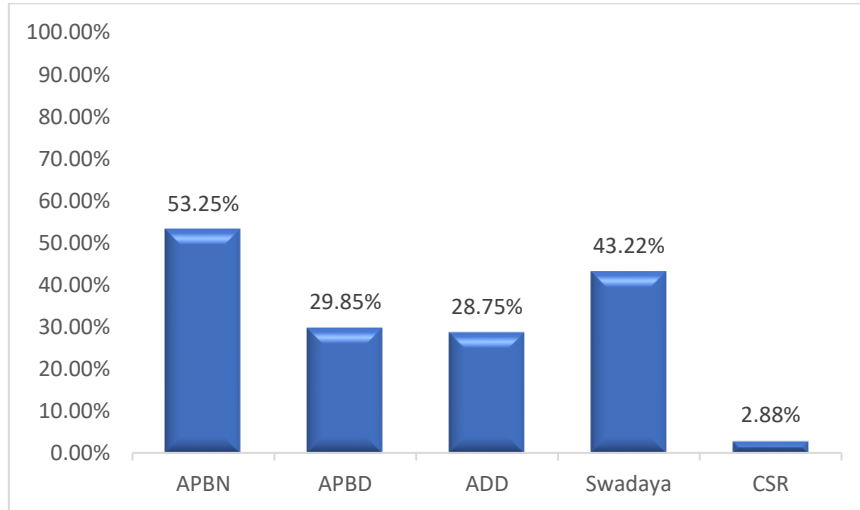


Berdasarkan data dari New Siga dalam gambar 3.1 memperlihatkan bahwa mayoritas sebanyak 91,96% atau sebanyak 2.139 Rumah DataKu memiliki legalitas pendirian yang ditandatangani oleh perangkat desa setempat baik oleh Kepala Desa ataupun Lurah, 2,90% atau sebanyak 62 Rumah DataKu ditandatangani oleh Camat, 3,60% atau sebanyak 77 pendirian Rumah DataKu ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah KB, 1,54% atau sebanyak 33 pendirian Rumah DataKu ditandatangani oleh Bupati/Walikota.

3.3 Sumber Anggaran Dalam Pengelolaan Rumah DataKu Pro PN

Hal yang cukup penting dalam pengelolaan Rumah DataKu adalah anggaran, dari hasil evaluasi dalam aplikasi New Siga ditemukan beberapa sumber pendanaan pengelolaan Rumah DataKu seperti dana swadaya masyarakat yang berasal dari masyarakat di wilayah tersebut, anggaran dana desa, bantuan swasta atau perusahaan baik melalui bantuan langsung ataupun melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), anggaran pemerintah daerah dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian atau lembaga.

Gambar 3.2 Persentase Sumber Anggaran Dalam Pengelolaan Rumah DataKu Pro PN



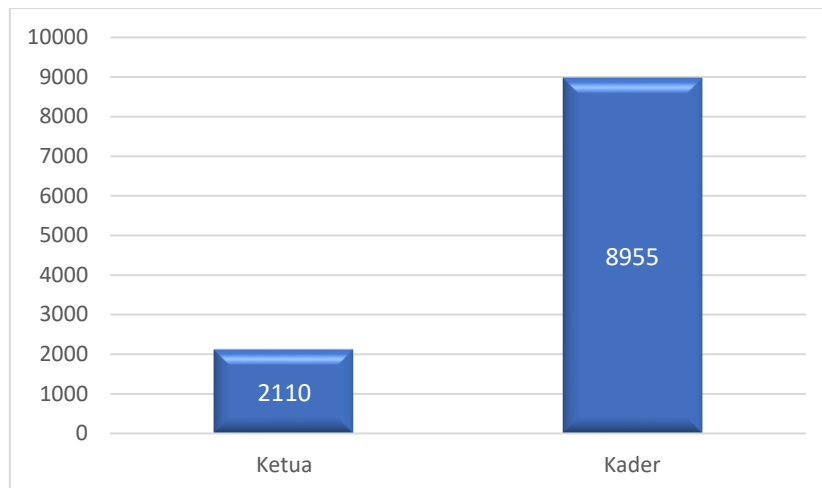
Berdasarkan gambar diatas dari total Rumah DataKu yang menjadi target Pro PN tahun 2022, sumber dana tertinggi berasal dari anggaran nasional (APBN) sebesar 53,25%, kemudian 43,22% berasal dari anggaran swadaya masyarakat, 29,85% berasal dari anggaran belanja daerah (APBD), 28,75% dari anggaran desa dan 2,88% berasal dari anggaran swasta.

3.4 Pengelolaan Rumah DataKu Pro PN

a. Pengurus Rumah DataKu

Secara teknis dalam penyelenggaraan kegiatan operasional harian Rumah DataKu dikelola oleh Pengurus Rumah DataKu. Standar pengurus minimal yang harus dimiliki yaitu seorang Ketua dan 2 orang kader. Namun pada pelaksanaannya jumlah ini bisa berkembang sesuai dengan kompleksitas pada Rumah DataKu misalnya luas wilayah, jumlah penduduk, jenis data yang dikelola, dan sebagainya.

Gambar 3.3 Pengurus Rumah DataKu Pro PN

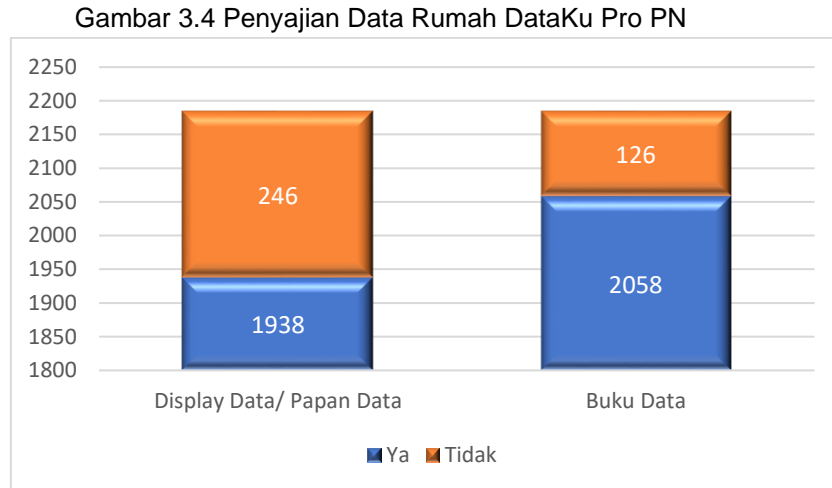


Berdasarkan gambar 3.3 dapat diketahui bahwa jumlah ketua di Rumah DataKu Pro PN sebanyak 2.110 orang, jika dibandingkan dengan jumlah Rumah DataKu yang telah teregistrasi maka terdapat 74 Rumah DataKu yang tidak memiliki ketua. Menjadi catatan dalam kepengurusan Rumah DataKu Pro PN adalah pengelola Rumah DataKu perlu mengkoscek ulang pada K0 Rumah DataKu Pro PN, apakah pada 74 Rumah DataKu Pro PN ini terdapat salah input karena jika di Rumah DataKu tidak memiliki ketua, maka tidak ada yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Rumah DataKu di desa/kelurahan tersebut.

Selain itu berdasarkan gambar tersebut juga dapat diketahui bahwa jumlah kader di Rumah DataKu Pro PN sebanyak 8.955 orang. Idealnya dalam pengelolaan Rumah DataKu, selain ketua juga dibutuhkan kader dalam menjalankan seluruh kegiatan dalam Rumah DataKu. Dalam Data New Siga juga ditemukan 2 Rumah DataKu yang belum memiliki kader, hal ini juga perlu dikroscek ulang pada K0 Rumah dataKu Pro PN oleh pengelola Rumah DataKu karena untuk dapat menjadi Rumah DataKu dengan klasifikasi paripurna, jumlah kepengurusan bukan menjadi syarat multak, namun secara garis besar dalam pelaksanaan Rumah DataKu untuk bisa menjadi tahap paripurna terutama dalam kelengkapan serta penyajian data tentu jumlah kepengurusan menjadi hal yang cukup penting. Diharapkan kedepannya, dengan jumlah kepengurusan yang cukup akan membantu memudahkan kepengelolaan Rumah DataKu menuju klasifikasi paripurna.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap lanjutan yang dilakukan setelah pengolahan data. Kegiatan ini menampilkan data dalam bentuk-bentuk tertentu bisa berupa tabel, grafik atau gambar sehingga lebih informatif dan mudah dibaca yang ditampilkan dalam *Display Data/ Papan Data* dan *Buku Data*.

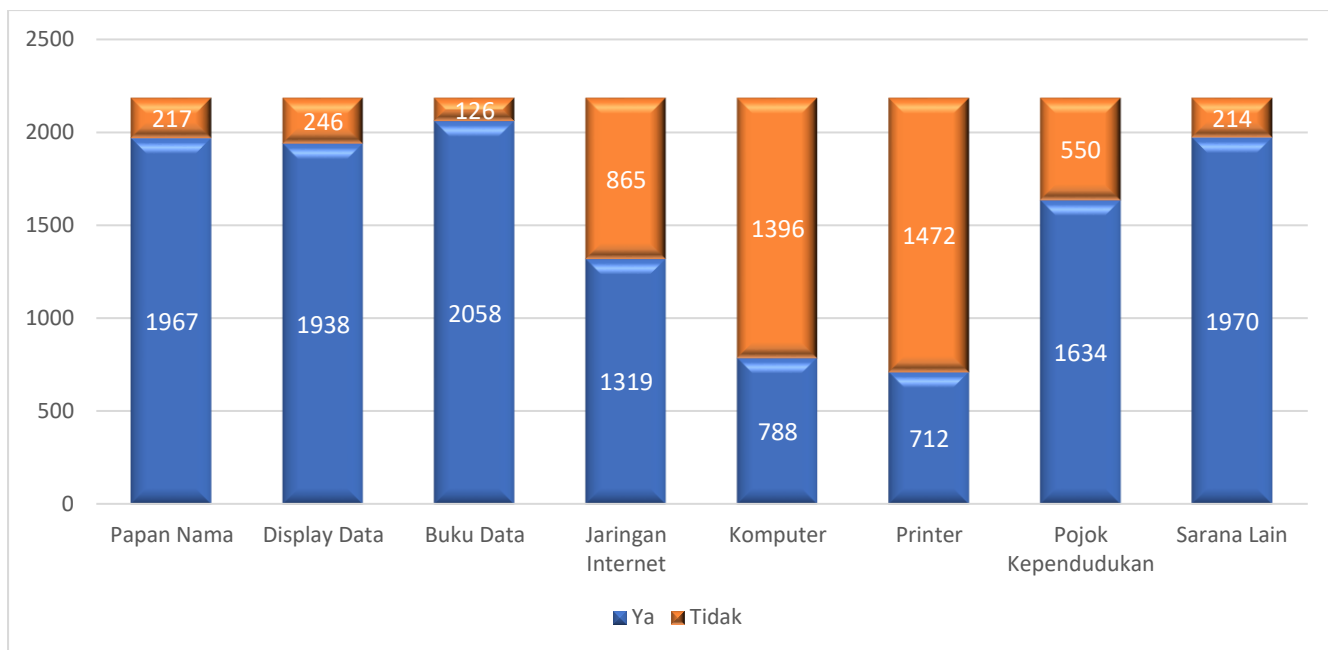


Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa penyajian data di Rumah DataKu Pro PN yaitu 88,73% penyajian data dengan Papan Data dan 94,23% penyajian data dengan buku data. Hal ini menunjukkan bahwa buku data masih menjadi media penyajian data yang banyak digunakan kader, bisa disebabkan karena kebutuhan anggaran yang lebih rendah dibandingkan pengadaan Papan Data.

c. Sarana dan Prasarana Rumah DataKu

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam penyelenggaraan Rumah DataKu. Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam Rumah DataKu terdiri dari papan nama Rumah DataKu, sarana pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data.

Gambar 3.5 Sarana dan Prasarana Rumah DataKu Pro PN

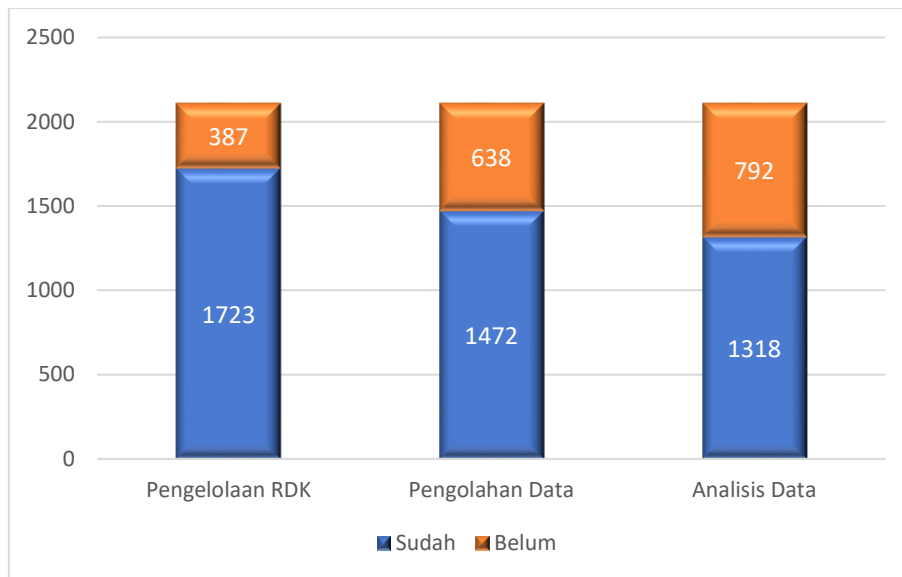


Secara keseluruhan, ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pengelolaan Rumah DataKu seperti papan nama, papan data/*display* data, buku data, dan pojok kependudukan sebagian besar di atas 70% sedangkan jaringan internet, komputer dan printer masih sebesar 36,08% dan 32,60%. Untuk ketersediaan komputer dan printer dalam Rumah DataKu memang tidak menjadi suatu hal yang diwajibkan, namun dalam penyelenggaraannya perangkat komputer dan printer ini dibutuhkan. Oleh karena itu untuk meminimalisir keterbatasan, pengelola Rumah DataKu bisa bekerja sama dengan kelurahan/desa untuk penggunaan perangkat komputer.

d. Orientasi pengurus Rumah DataKu

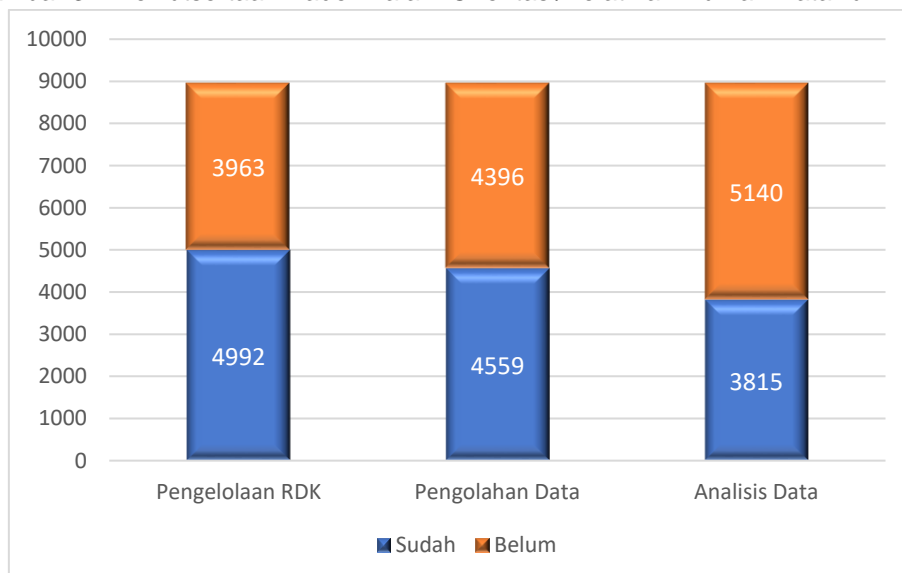
Salah satu upaya dalam penyelenggaraan Rumah DataKu yaitu pengembangan kemampuan pengurus Rumah DataKu melalui orientasi. Orientasi pengurus Rumah DataKu juga menjadi salah satu indikator dalam pengklasifikasian Rumah DataKu, dimana untuk mencapai klasifikasi Paripurna Pengurus harus sudah ikut serta dalam orientasi pengelolaan Rumah DataKu, pengolahan data dan analisis data.

Gambar 3.6 Keikutsertaan Ketua Dalam Orientasi/Pelatihan Rumah DataKu Pro PN



Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 1.723 kader atau 81,66% dari 2.110 ketua sudah ikut serta dalam kegiatan orientasi/pelatihan pengelolaan Rumah DataKu, sebanyak 1.472 atau 69,76% ketua sudah ikut serta dalam kegiatan orientasi/pelatihan Pengolahan Data, dan sebanyak 1.318 atau 62,46% ketua sudah ikut serta dalam kegiatan orientasi/pelatihan Analisis Data.

Gambar 3.7 Keikutsertaan Kader Dalam Orientasi/Pelatihan Rumah DataKu Pro PN



Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 4.992 kader atau 55,75% dari 8.955 jumlah kader sudah ikut serta dalam kegiatan orientasi/pelatihan pengelolaan Rumah DataKu, sebanyak 4.559 atau 50,91%

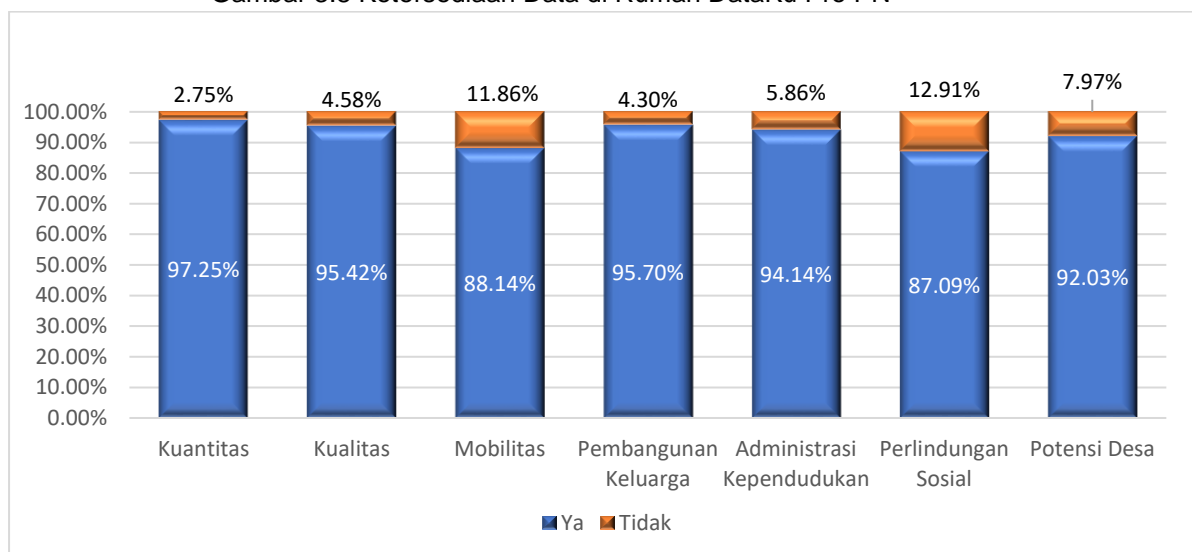
kader sudah ikut serta dalam kegiatan orientasi/pelatihan Pengolahan Data, dan sebanyak 3.815 atau 42,60% kader sudah ikut serta dalam kegiatan orientasi/pelatihan Analisis Data.

Dari ketiga pelatihan yang ada memang keikutsertaan pengurus Rumah DataKu dalam pelatihan analisis data paling kecil dibandingkan orientasi/pelatihan pengelolaan Rumah DataKu dan Pengolahan Data. Idealnya pelatihan pengolahan dan analisis data merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan dalam orientasi/pelatihan pengelolaan data di Rumah DataKu. Hal ini dapat menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi pengurus Rumah DataKu agar diikutsertakan dalam pelatihan pengembangan bagi keseluruhan pengelolaan rumah dataku terutama pelatihan pengolahan dan analisis data yang dinilai sangat penting.

e. Ketersediaan Data di Rumah DataKu

Tersedianya data yang terkini, valid dan terbaru di lingkup desa menjadi salah satu tujuan utama dalam pengelolaan Rumah DataKu. Data yang dikumpulkan di Rumah DataKu merupakan data umum yang memberikan indikasi keberadaan serta potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah desa. terdapat 7 jenis kelompok data yang dikumpulkan oleh para pengelola Rumah DataKu, seperti data kuantitas, data kualitas, data mobilitas, data pembangunan keluarga, data administrasi kependudukan, data perlindungan sosial dan data potensi desa.

Gambar 3.8 Ketersediaan Data di Rumah DataKu Pro PN



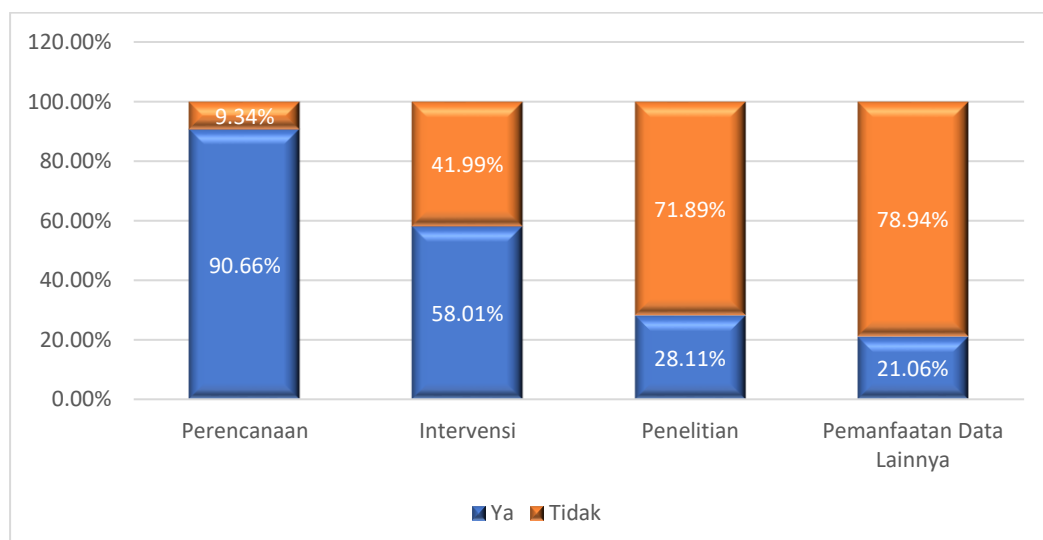
Secara keseluruhan ketersediaan data di Rumah DataKu sebagian besar sudah diatas 90%, namun untuk ketersediaan data Mobilitas sebesar 88,14% dan Perlindungan sosial sebesar 87,09%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, ketersediaan data mobilitas sudah naik 5 kali lipat dari tahun lalu yaitu dari 370 menjadi 1.925 sedangkan ketersediaan data perlindungan sosial yaitu 366 menjadi 1.902.

Data mobilitas ini memang agak sulit untuk diperoleh di lapangan karena minimnya pelaporan yang mencatat mobilitas penduduk di wilayah Rumah DataKu tersebut, sedangkan data perlindungan sosial yang merupakan rekapitulasi data bantuan pemerintah yang juga sulit diperoleh.

f. Kegiatan Pemanfaatan dalam Rumah DataKu

Sebagai kelompok kegiatan masyarakat dalam rangka penyediaan data kependudukan yang valid dan terbaru di lingkup wilayah desa/kelurahan, pelaksanaan Rumah DataKu dapat menjadi bagian dari sistem pembangunan kependudukan, yang produknya dapat dimanfaatkan oleh stakeholder baik oleh pemerintah, masyarakat sipil, maupun pihak non pemerintah yang bergerak di bidang pembangunan SDM, sosial, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, UMKM dalam rangka meningkatkan akurasi intervensi program pembangunan masyarakat.

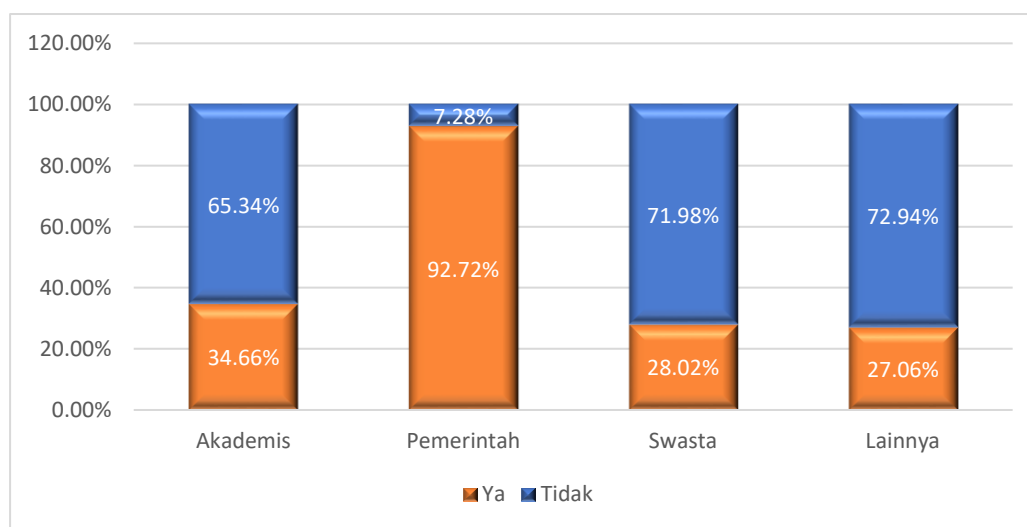
Gambar 3.9 Pemanfaatan Rumah DataKu Pro PN



Pemanfaatan Rumah DataKu Pro PN tahun 2022 digunakan sebagai masukan dalam bahan perencanaan sebesar 90,66%, hal ini sejalan dengan tujuan dan fungsi rumah data yang menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, data yang tersedia di Rumah DataKu juga dimanfaatkan sebagai bahan intervensi sebesar 58,01%, penelitian yang mungkin dilakukan lintas sektor maupun akademisi sebesar 28,11%, dan pemanfaatan data lainnya sebesar 21,06%.

Secara keseluruhan persentase pemanfaatan Rumah dataKu Pro PN mengalami penurunan pada pemanfaatan perencanaan dan Intervensi, namun ada kenaikan pada pemanfaatan untuk penelitian dan lainnya. Hal ini bisa disebabkan karena data yang ada lebih tersebar pemanfaatannya untuk penelitian maupun pemanfaatan lainnya. Selain itu hal positif lainnya yang perlu digarisbawahi dan dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 5,19% belum dimanfaatkan, tetapi ditahun ini sudah sepenuhnya dimanfaatkan,

Gambar 3.10 Pemanfaat Rumah DataKu Pro PN



Pemanfaat Rumah DataKu Pro PN terbanyak pada tahun 2022 adalah Pemerintah sebesar 92,72%, kemudian akademisi sebesar 34,66%, Swasta sebesar 28,02% dan lainnya sebesar 27,06%.

Hal ini disebabkan model pengelolaan Rumah DataKu terikat dengan institusi di sekelilingnya, tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah setempat akan menjadi kunci utama dalam

keberhasilan pengelolaan Rumah DataKu, sehingga pemerintah desa setempat tentu akan menjadi pemanfaat terbesar dari tujuan dan fungsi rumah data secara keseluruhan.

3.5 Capaian Realisasi Anggaran dan Target Rumah DataKu Pro PN

Anggaran Rumah DataKu yang menjadi proyek Prioritas nasional (Pro PN) tahun 2022 mengalami dampak pemotongan, dari sebelumnya secara total pagu sebesar 35.000.000.000 menjadi 25.966.278.000 dan besaran potongan untuk tiap-tiap provinsi berbeda. Pada akhir periode tahun 2022, secara keseluruhan capaian realisasi anggaran Pro PN berdasarkan e-monev Bappenas yaitu 92,62%. Dimana tercatat 18 provinsi dapat mencapai lebih dari 99% realisasi anggaran Pro PN realisasi terendah dengan persentase sebesar 61,86% di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 63,20% di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk capaian realisasi target Pro PN Rumah DataKu Paripurna di Kampung KB Percontohan, tercatat 30 provinsi yang dapat mencapai seluruh target sampai dengan akhir periode tahun 2022, yaitu provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, Bengkulu, Kep Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Maluku Utara, Kep Riau, Sulawesi Barat, DKI Jakarta. Sedangkan capaian Rumah DataKu Paripurna di tiga Provinsi lain belum mencapai 100% yaitu Sumatera Utara sebesar 92,49%, Nusa Tenggara Timur sebesar 69,05%, dan Papua Barat sebesar 55,00%. Untuk ketiga provinsi ini belum dapat menyelesaikan target Pro PN Rumah DataKu Paripurna di tahun 2022, dapat terus melakukan upaya peningkatan tahapan klasifikasi dan menjadi target terhutang di tahun berikutnya dan bukan menjadi target Pro PN tahun 2023.

Catatan yang dapat diambil yaitu walaupun mengalami pemotongan yang tertinggi di atas 80,86% namun dapat menyelesaikan target Paripurna 100%, hal ini membuktikan bahwa banyaknya anggaran tidak menjadi penentu utama dalam

keberhasilan dalam pencapaian target. Pengelola Rumah DataKu tingkat Provinsi menjadi lebih kreatif dalam mencari cara untuk mencapai target Pro PN yang telah ditetapkan, selain itu jumlah anggaran juga tidak menjamin kuantitas maupun kualitas dari pencapaian target Pro PN.

Gambar 3.11 Pagu dan Realisasi Anggaran Serta Capaian Rumah DataKu Pro PN Tahun 2022

NO	PROVINSI	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REFOCUSING (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	TARGET RDK PARIPURNA DI KAMPUNG KB	CAPAIAN RDK PARIPURNA DI KAMPUNG KB	REALISASI (%)
1	JAWA BARAT	2,170,000,000	1,751,650,000	1,735,606,340	99.08	155	155	100.00
2	JAWA TENGAH	2,800,000,000	535,852,000	534,948,250	99.83	200	200	100.00
3	DI YOGYAKARTA	868,000,000	622,368,000	622,065,000	99.95	62	62	100.00
4	JAWA TIMUR	4,900,000,000	3,815,339,000	3,814,493,974	99.98	350	350	100.00
5	ACEH	1,472,000,000	1,460,200,000	1,460,022,580	99.99	92	92	100.00
6	SUMATERA UTARA	2,768,000,000	2,768,000,000	1,749,340,013	63.20	173	160	92.49
7	SUMATERA BARAT	2,032,000,000	1,592,260,000	1,586,325,500	99.63	127	127	100.00
8	SUMATERA SELATAN	896,000,000	494,660,000	487,067,250	98.47	56	56	100.00
9	LAMPUNG	630,000,000	624,940,000	624,787,000	99.98	45	45	100.00
10	KALIMANTAN BARAT	896,000,000	513,518,000	475,949,360	92.68	56	56	100.00
11	KALIMANTAN SELATAN	320,000,000	189,776,000	189,085,080	99.64	20	20	100.00
12	SULAWESI UTARA	480,000,000	385,210,000	384,479,980	99.81	30	30	100.00
13	SULAWESI SELATAN	1,152,000,000	733,055,000	732,220,300	99.89	72	72	100.00
14	BALI	532,000,000	442,965,000	439,242,505	99.16	38	38	100.00
15	NUSA TENGGARA BARAT	1,040,000,000	306,175,000	294,309,800	96.12	65	65	100.00
16	RIAU	288,000,000	218,320,000	218,220,981	99.95	18	18	100.00
17	JAMBI	1,408,000,000	1,121,402,000	1,089,941,700	97.19	88	88	100.00
18	KALIMANTAN TENGAH	448,000,000	345,600,000	334,726,171	96.85	28	28	100.00
19	KALIMANTAN TIMUR	832,000,000	832,000,000	731,830,800	87.96	52	52	100.00
20	SULAWESI TENGAH	224,000,000	200,795,000	187,637,400	93.45	14	14	100.00
21	SULAWESI TENGGARA	1,445,000,000	796,864,000	770,747,572	96.72	85	85	100.00
22	MALUKU	432,000,000	420,000,000	419,711,835	99.93	24	24	100.00
23	PAPUA	1,273,000,000	613,720,000	608,029,950	99.07	67	67	100.00
24	NUSA TENGGARA TIMUR	756,000,000	700,410,000	433,292,400	61.86	42	29	69.05
25	BENGKULU	800,000,000	699,815,000	659,357,142	94.22	50	50	100.00
26	KEP BANGKA BELITUNG	224,000,000	224,000,000	223,576,760	99.81	14	14	100.00
27	BANTEN	672,000,000	669,020,000	668,622,168	99.94	48	48	100.00
28	GORONTALO	624,000,000	500,035,000	469,429,438	93.88	39	39	100.00
29	MALUKU UTARA	720,000,000	492,338,000	491,481,800	99.83	40	40	100.00
30	PAPUA BARAT	380,000,000	380,000,000	344,800,003	90.74	20	11	55.00
31	KEP RIAU	378,000,000	375,991,000	375,864,588	99.97	21	21	100.00
32	SULAWESI BARAT	720,000,000	720,000,000	474,229,600	65.87	45	45	100.00
33	DKI JAKARTA/DITRENDUK	420,000,000	420,000,000	419,691,735	99.93	30	30	100.00
TOTAL NASIONAL		35,000,000,000	25,966,278,000	24,051,134,975	92.62	2,266	2,231	98.46

Sumber Data: E-monev Bappenas Per 11 Januari 2023

3.6 Kendala atau Permasalahan

Ada beberapa kendala ataupun permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan Rumah DataKu selama tahun 2022, diantaranya :

- a. Keterbatasan anggaran karena blokir *Automatic adjustment*.
- b. Keberagaman latar belakang kader sehingga banyak kader yang kurang memahami aplikasi Rumah Dataku yang telah diajarkan.
- c. Kondisi geografis wilayah tertentu yang menyebabkan jaringan internet yang kurang baik.
- d. Kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dan Pimpinan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Kegiatan Rumah DataKu.
- e. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan pengelolaan Rumah DataKu.
- f. Pelaporan Kegiatan Rumah DataKu belum terlaksana secara optimal.

,

BAB IV

PENUTUP

Rumah DataKu merupakan kelompok kegiatan masyarakat yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi kependudukan di tingkat mikro untuk memenuhi kebutuhan akan data dan informasi keluarga dalam pembangunan di Kampung KB pada khususnya dan desa/kelurahan pada umumnya. Mengingat bahwa Rumah DataKu menjadi pusat integrasi data di tingkat desa/kelurahan dan menjadi salah satu capaian target program Pro PN maka diperlukan sebuah evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Rumah DataKu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pendekatan yang digunakan dalam mengevaluasi Rumah DataKu Pro PN 2022 adalah dengan pendekatan metode desk review dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui aplikasi New Siga dan E-Monev Bappenas. Target Rumah DataKu Paripurna yang menjadi Proyek Prioritas Nasional tahun 2022 adalah sebanyak 2.266 yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Anggaran Rumah DataKu yang menjadi proyek Prioritas Nasional (Pro PN) tahun 2022 mengalami dampak pemotongan, dari sebelumnya secara total pagu sebesar 35.000.000.000 menjadi 25.966.278.000.

Sampai dengan 31 Desember 2022 dari total 2.266 target Rumah DataKu Paripurna yang menjadi target dalam anggaran Pro PN Tahun 2022 dapat diketahui sebagai berikut:

- a. terdapat 2.184 atau 96,38% Rumah DataKu yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah menginputkan K0 registrasi dalam New Siga.
- b. Terdapat 1.862 (82,20%) Rumah DataKu yang dikategorikan dalam klasifikasi paripurna, 36 Rumah DataKu dalam klasifikasi lengkap, dan 286 Rumah DataKu dalam klasifikasi sederhana.
- c. Ada 17,79% lagi yang menjadi beban tugas untuk menjadi Rumah DataKu Paripurna.
- d. Pada akhir periode tahun 2022, secara keseluruhan capaian realisasi anggaran Pro PN berdasarkan e-monev Bappenas yaitu 92,62%. Dimana tercatat 18 provinsi dapat mencapai lebih dari 99% realisasi anggaran Pro PN realisasi

terendah dengan persentase sebesar 61,86% di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 63,20% di Provinsi Sumatera Utara.

Berikut ini beberapa rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan kualitas pelaksanaan Rumah DataKu Tahun 2023, yaitu:

- a. Pembinaan dan Pendampingan ke daerah secara langsung oleh provinsi.
- b. Mengusulkan Kembali DAK fisik dan BOKB bagi pengelolaan Rumah DataKu
- c. Perlunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas melalui pelatihan/orientasi dasar dalam penyelenggaraan Rumah DataKu bagi pengelola Rumah DataKu
- d. Diperlukan advokasi dengan pemerintah daerah terkait fungsi dan manfaat Rumah DataKu dalam penyediaan data di tingkat mikro
- e. Bekerjasama dengan stakeholder dalam penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana Bersama yang ada di desa/kelurahan
- f. Pembinaan terhadap kader Rumah DataKu agar secara berkala melaporkan perkembangan Rumah DataKu melalui mekanisme pelaporan yang sudah ditentukan

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pejabat Penetapan SK Pendirian dan Pengukuhan Pengurus Rumah DataKu Pro PN

Provinsi	Bupati	Camat	Kades	Kepala OPD	Total
ACEH		5	90	2	97
BALI			37	1	38
BANTEN			48		48
BENGKULU	1		49		50
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		2	60		62
DKI JAKARTA			30		30
GORONTALO	4		30		34
JAMBI	1	3	87		91
JAWA BARAT			157		157
JAWA TENGAH		3	91	5	99
JAWA TIMUR	2	12	341	3	358
KALIMANTAN BARAT		1	22	1	24
KALIMANTAN SELATAN			26		26
KALIMANTAN TENGAH			28		28
KALIMANTAN TIMUR			28	4	32
KALIMANTAN UTARA			18	2	20
KEP. BANGKA BELITUNG			13	1	14
KEPULAUAN RIAU		1	20		21
LAMPUNG		1	44		45
MALUKU			23	1	24
MALUKU UTARA			45		45
NUSA TENGGARA BARAT		4	55		59
NUSA TENGGARA TIMUR		1	32		33
PAPUA	2		21	41	64
PAPUA BARAT			2	13	15
RIAU		1	17		18
SULAWESI BARAT		8	37	1	46
SULAWESI SELATAN		1	75		76
SULAWESI TENGAH		2	10		12
SULAWESI TENGGARA	5	2	77	1	85
SULAWESI UTARA			33		33
SUMATERA BARAT	15	3	107	1	126
SUMATERA SELATAN	2	5	49		56
SUMATERA UTARA	1	7	165		173
Grand Total	33	62	1967	77	2139

Lampiran 2. Rekapitulasi sumber dana pengelolaan Rumah DataKu Pro PN

Provinsi	APBN		APBD		ADD		Swadaya		Swasta CSR	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
ACEH	63	34	28	69	40	57	24	73	2	95
BALI	24	14	11	27	14	24	6	32	1	37
BANTEN	22	26	18	30	7	41	32	16	4	44
BENGKULU	16	34	6	44	19	31	26	24		50
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	22	40	31	31	28	34	35	27	5	57
DKI JAKARTA	13	17	16	14		30	21	9	3	27
GORONTALO	12	22	10	24	18	16	7	27	1	33
JAMBI	40	51	24	67	21	70	42	49	3	88
JAWA BARAT	54	103	41	116	38	119	84	73	4	153
JAWA TENGAH	42	60	36	66	52	50	58	44	6	96
JAWA TIMUR	161	197	116	242	108	250	166	192	11	347
KALIMANTAN BARAT	12	20	3	29	9	23	16	16	1	31
KALIMANTAN SELATAN	11	15	11	15	5	21	12	14		26
KALIMANTAN TENGAH	18	10	4	24	14	14	10	18	3	25
KALIMANTAN TIMUR	15	17	7	25	10	22	17	15	2	30
KALIMANTAN UTARA	10	10	9	11	5	15	8	12		20
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	10	4	8	6	5	9	6	8	2	12
KEPULAUAN RIAU	6	15	7	14	8	13	12	9	2	19
LAMPUNG	22	23	9	36	11	34	18	27		45
MALUKU	18	6		24	11	13	6	18		24
MALUKU UTARA	44	4	6	42	3	45	29	19	1	47
NUSA TENGGARA BARAT	34	32	7	59	20	46	35	31		66
NUSA TENGGARA TIMUR	35	10	7	38	9	36	9	36		45
PAPUA	45	22	20	47	6	61	25	42		67
PAPUA BARAT	20		2	18		20	1	19		20
RIAU	5	13	2	16	3	15	12	6		18
SULAWESI BARAT	19	27	9	37	16	30	31	15	1	45
SULAWESI SELATAN	30	46	14	62	13	63	40	36	1	75
SULAWESI TENGAH	8	5	1	12	3	10	7	6		13
SULAWESI TENGGARA	36	49	28	57	19	66	31	54	1	84
SULAWESI UTARA	16	17	6	27	7	26	14	19		33
SUMATERA BARAT	119	10	95	34	65	64	47	82	7	122

Provinsi	APBN		APBD		ADD		Swadaya		Swasta CSR	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
SUMATERA SELATAN	44	12	19	37	8	48	17	39	1	55
SUMATERA UTARA	117	56	41	132	33	140	40	133	1	172
Grand Total	1163	1021	652	1532	628	1556	944	1240	63	2121

Lampiran 3. Jumlah Pengurus Rumah DataKu Pro PN

No	Provinsi	Ketua	Jumlah Kader
1	ACEH	100	410
2	BALI	172	125
3	BANTEN	125	207
4	BENGKULU	12	215
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	89	388
6	DKI JAKARTA	53	106
7	GORONTALO	51	126
8	JAMBI	47	313
9	JAWA BARAT	17	739
10	JAWA TENGAH	21	408
11	JAWA TIMUR	30	1634
12	KALIMANTAN BARAT	161	105
13	KALIMANTAN SELATAN	102	104
14	KALIMANTAN TENGAH	63	135
15	KALIMANTAN TIMUR	359	133
16	KALIMANTAN UTARA	47	45
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	39	50
18	KEPULAUAN RIAU	58	75
19	LAMPUNG	40	203
20	MALUKU	26	90
21	MALUKU UTARA	27	160
22	NUSA TENGGARA BARAT	24	157
23	NUSA TENGGARA TIMUR	31	131
24	PAPUA	18	225
25	PAPUA BARAT	28	17
26	RIAU	11	86
27	SULAWESI BARAT	72	178
28	SULAWESI SELATAN	80	387
29	SULAWESI TENGAH	31	44
30	SULAWESI TENGGARA	46	339
31	SULAWESI UTARA	21	114
32	SUMATERA BARAT	49	516
33	SUMATERA SELATAN	55	222
34	SUMATERA UTARA	5	768
Grand Total		2110	8955

Lampiran 4. Keikutsertaan Pelatihan/Orientasi dasar oleh Ketua Rumah DataKu Pro PN

No	Provinsi	Pengelolaan RDK		Pengolahan Data		Analisis Data	
		Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum
1	ACEH	97	3	83	17	75	25
2	SUMATERA UTARA	156	16	144	28	141	31
3	SUMATERA BARAT	112	13	101	24	36	89
4	RIAU	10	2	10	2	10	2
5	JAMBI	78	11	73	16	63	26
6	SUMATERA SELATAN	53	0	49	4	48	5
7	BENGKULU	43	8	41	10	41	10
8	LAMPUNG	37	10	28	19	27	20
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	14	3	13	4	13	4
10	KEPULAUAN RIAU	21	0	19	2	19	2
11	DKI JAKARTA	24	6	23	7	23	7
12	JAWA BARAT	138	23	133	28	128	33
13	JAWA TENGAH	64	38	44	58	35	67
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	57	6	54	9	53	10
15	JAWA TIMUR	303	56	266	93	261	98
16	BANTEN	41	6	40	7	33	14
17	BALI	34	5	30	9	28	11
18	NUSA TENGGARA BARAT	28	30	14	44	10	48
19	NUSA TENGGARA TIMUR	9	31	2	38	2	38
20	KALIMANTAN BARAT	11	15	5	21	0	26
21	KALIMANTAN TENGAH	22	5	23	4	21	6
22	KALIMANTAN SELATAN	15	9	9	15	6	18
23	KALIMANTAN TIMUR	28	3	25	6	24	7
24	KALIMANTAN UTARA	15	3	14	4	13	5
25	SULAWESI UTARA	26	2	24	4	24	4
26	SULAWESI TENGAH	8	3	7	4	0	11
27	SULAWESI SELATAN	61	11	60	12	58	14
28	SULAWESI TENGGARA	60	20	39	41	42	38
29	GORONTALO	13	18	3	28	2	29
30	SULAWESI BARAT	35	11	32	14	31	15
31	MALUKU	14	7	13	8	11	10
32	MALUKU UTARA	42	7	6	43	1	48
33	PAPUA	50	5	42	13	36	19
34	PAPUA BARAT	4	1	3	2	3	2
	Jumlah	1723	387	1472	638	1318	792

Lampiran 5. Keikutsertaan Pelatihan/Orientasi dasar oleh Kader Rumah DataKu Pro PN

NO	Provinsi	Pengelolaan RDK		Pengolahan Data		Analisis Data	
		Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum
1	ACEH	295	115	295	115	252	158
2	SUMATERA UTARA	388	380	366	402	353	415
3	SUMATERA BARAT	415	101	397	119	142	374
4	RIAU	56	30	57	29	54	32
5	JAMBI	215	98	218	95	189	124
6	SUMATERA SELATAN	195	27	188	34	186	36
7	BENGKULU	68	147	61	154	55	160
8	LAMPUNG	110	93	85	118	73	130
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	20	30	21	29	19	31
10	KEPULAUAN RIAU	60	15	48	27	50	25
11	DKI JAKARTA	72	34	63	43	60	46
12	JAWA BARAT	306	433	242	497	233	506
13	JAWA TENGAH	188	220	120	288	88	320
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	303	85	292	96	285	103
15	JAWA TIMUR	949	685	848	786	763	871
16	BANTEN	115	92	101	106	91	116
17	BALI	70	55	56	69	49	76
18	NUSA TENGGARA BARAT	45	112	45	112	31	126
19	NUSA TENGGARA TIMUR	19	112	3	128	1	130
20	KALIMANTAN BARAT	19	86	15	90	4	101
21	KALIMANTAN TENGAH	117	18	110	25	105	30
22	KALIMANTAN SELATAN	27	77	26	78	14	90
23	KALIMANTAN TIMUR	84	49	55	78	51	82
24	KALIMANTAN UTARA	31	14	29	16	28	17
25	SULAWESI UTARA	68	46	69	45	66	48
26	SULAWESI TENGAH	13	31	9	35	0	44
27	SULAWESI SELATAN	129	258	126	261	117	270
28	SULAWESI TENGGARA	221	118	192	147	185	154
29	GORONTALO	26	100	22	104	6	120
30	SULAWESI BARAT	82	96	79	99	70	108
31	MALUKU	52	38	51	39	25	65
32	MALUKU UTARA	42	118	76	84	4	156
33	PAPUA	175	50	180	45	152	73
34	PAPUA BARAT	17	0	14	3	14	3
	Jumlah	4992	3963	4559	4396	3815	5140

Lampiran 6. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah DataKu Pro PN berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	Papan Nama	Display Data	Buku Data	Jaringan Internet	Komputer	Printer	Pojok Kependudukan
1	ACEH	86	92	96	91	86	85	84
2	SUMATERA UTARA	149	155	168	82	39	29	137
3	SUMATERA BARAT	126	126	120	62	38	30	91
4	RIAU	15	18	18	12	7	8	17
5	JAMBI	87	84	89	54	35	33	76
6	SUMATERA SELATAN	56	56	54	13	4	4	34
7	BENGKULU	50	49	49	44	29	28	47
8	LAMPUNG	43	40	44	32	16	17	26
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	11	13	12	10	2	2	11
10	KEPULAUAN RIAU	18	20	19	16	17	16	16
11	DKI JAKARTA	20	30	30	30	29	26	13
12	JAWA BARAT	120	120	149	93	66	61	103
13	JAWA TENGAH	92	87	96	78	38	32	78
14	DI YOGYAKARTA	59	62	59	51	45	33	52
15	JAWA TIMUR	353	347	358	247	135	125	330
16	BANTEN	47	44	46	35	20	13	41
17	BALI	34	36	37	38	34	34	29
18	NUSA TENGGARA BARAT	49	37	52	20	5	6	27
19	NUSA TENGGARA TIMUR	28	27	36	21	2	2	20
20	KALIMANTAN BARAT	21	21	19	12	4	4	22
21	KALIMANTAN TENGAH	28	28	28	22	11	11	28
22	KALIMANTAN SELATAN	25	17	18	18	8	7	17
23	KALIMANTAN TIMUR	41	49	50	36	17	18	46
24	SULAWESI UTARA	33	29	32	11	9	8	27
25	SULAWESI TENGAH	12	10	12	7	4	3	10
26	SULAWESI SELATAN	72	76	76	18	4	2	44
27	SULAWESI TENGGARA	70	67	73	46	21	19	44

No	Provinsi	Papan Nama	Display Data	Buku Data	Jaringan Internet	Komputer	Printer	Pojok Kependudukan
28	GORONTALO	32	21	31	11	5	4	22
29	SULAWESI BARAT	45	40	43	27	8	7	19
30	MALUKU	20	19	20	14	12	10	14
31	MALUKU UTARA	47	45	48	12	3	4	44
32	PAPUA	60	56	59	37	17	14	47
33	PAPUA BARAT	18	17	17	19	18	17	18
Grand Total		1967	1938	2058	1319	788	712	1634
Persentase dengan Target Pro PN		90.06%	88.74%	94.23%	60.39%	36.08%	32.60%	74.82%

Lampiran 7. Ketersediaan Data di Rumah DataKu Pro PN berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	Kuantitas		Kualitas		Mobilitas		Pembangunan Keluarga		Adminduk		Perlindungan Sosial		Potensi Desa	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1	ACEH	97		96	1	93	4	97		97		95	2	96	1
2	BALI	38		38		37	1	38		38		36	2	38	
3	BANTEN	48		47	1	44	4	48		46	2	44	4	47	1
4	BENGGULU	50		50		48	2	50		50		50		50	
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	62		61	1	55	7	61	1	60	2	56	6	60	2
6	DKI JAKARTA	30		28	2	28	2	28	2	26	4	28	2	30	
7	GORONTALO	30	4	29	5	23	11	30	4	31	3	23	11	29	5
8	JAMBI	89	2	91		82	9	91		89	2	82	9	84	7
9	JAWA BARAT	155	2	153	4	145	12	155	2	153	4	145	12	146	11
10	JAWA TENGAH	100	2	97	5	91	11	94	8	94	8	83	19	97	5
11	JAWA TIMUR	357	1	358		341	17	357	1	353	5	337	21	348	10
12	KALIMANTAN BARAT	25	7	21	11	24	8	24	8	26	6	19	13	25	7
13	KALIMANTAN SELATAN	24	2	23	3	18	8	24	2	19	7	16	10	21	5
14	KALIMANTAN TENGAH	28		28		28		28		27	1	26	2	28	
15	KALIMANTAN TIMUR	32		32		31	1	32		32		31	1	32	
16	KALIMANTAN UTARA	20		19	1	20		20		20		19	1	20	
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	14		14		13	1	14		14		10	4	14	
18	KEPULAUAN RIAU	21		21		18	3	21		21		20	1	21	
19	LAMPUNG	45		45		44	1	45		43	2	36	9	40	5
20	MALUKU	21	3	20	4	16	8	20	4	20	4	13	11	20	4
21	MALUKU UTARA	48		48		48		48		48		48		48	
22	NUSA TENGGARA BARAT	56	10	51	15	42	24	48	18	51	15	44	22	51	15

No	Provinsi	Kuantitas		Kualitas		Mobilitas		Pembangunan Keluarga		Adminduk		Perlindungan Sosial		Potensi Desa	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
23	NUSA TENGGARA TIMUR	39	6	33	12	29	16	35	10	35	10	22	23	33	12
24	PAPUA	62	5	59	8	54	13	58	9	59	8	57	10	59	8
25	PAPUA BARAT	19	1	18	2	18	2	19	1	19	1	19	1	19	1
26	RIAU	18		18		15	3	18		18		15	3	17	1
27	SULAWESI BARAT	45	1	44	2	39	7	44	2	41	5	33	13	45	1
28	SULAWESI SELATAN	76		76		69	7	76		75	1	72	4	76	
29	SULAWESI TENGAH	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	13	
30	SULAWESI TENGGARA	72	13	72	13	63	22	70	15	70	15	62	23	70	15
31	SULAWESI UTARA	33		33		25	8	33		32	1	27	6	29	4
32	SUMATERA BARAT	129		121	8	107	22	126	3	118	11	114	15	124	5
33	SUMATERA SELATAN	56		56		43	13	56		53	3	50	6	51	5
34	SUMATERA UTARA	173		172	1	162	11	170	3	166	7	158	15	129	44
	Grand Total	2124	60	2084	100	1925	259	2090	94	2056	128	1902	282	2010	174

Lampiran 8. Kegiatan Pemanfaatan Data di Rumah DataKu Pro PN berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	Perencanaan		Intervensi		Penelitian		Lainnya	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	ACEH	93	4	83	14	63	34	20	77
2	BALI	36	2	27	11	19	19	6	32
3	BANTEN	47	1	28	20	12	36	12	36
4	BENGKULU	49	1	28	22	25	25	17	33
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	61	1	44	18	33	29	10	52
6	DKI JAKARTA	23	7	12	18	6	24	2	28
7	GORONTALO	22	12	16	18	8	26	11	23
8	JAMBI	88	3	58	33	42	49	31	60
9	JAWA BARAT	139	18	73	84	39	118	45	112
10	JAWA TENGAH	93	9	45	57	21	81	26	76
11	JAWA TIMUR	326	32	169	189	77	281	36	322
12	KALIMANTAN BARAT	29	3	13	19	9	23	10	22
13	KALIMANTAN SELATAN	24	2	13	13	6	20	9	17
14	KALIMANTAN TENGAH	28		25	3	20	8	11	17
15	KALIMANTAN TIMUR	29	3	19	13	10	22	9	23
16	KALIMANTAN UTARA	20		4	16		20	2	18
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	12	2	12	2	4	10	3	11
18	KEPULAUAN RIAU	21		14	7	6	15	4	17
19	LAMPUNG	41	4	19	26	6	39	8	37
20	MALUKU	21	3	13	11	5	19	11	13
21	MALUKU UTARA	45	3	33	15	7	41	10	38
22	NUSA TENGGARA BARAT	54	12	24	42	6	60	8	58
23	NUSA TENGGARA TIMUR	27	18	13	32	2	43	12	33
24	PAPUA	61	6	48	19	21	46	22	45
25	PAPUA BARAT	19	1	16	4	16	4		20
26	RIAU	18		8	10	4	14	1	17
27	SULAWESI BARAT	43	3	28	18	9	37	7	39
28	SULAWESI SELATAN	73	3	33	43	13	63	17	59
29	SULAWESI TENGAH	11	2	5	8	3	10	4	9
30	SULAWESI TENGGARA	66	19	36	49	11	74	31	54
31	SULAWESI UTARA	25	8	22	11	5	28	8	25
32	SUMATERA BARAT	126	3	110	19	44	85	24	105
33	SUMATERA SELATAN	53	3	51	5	17	39	6	50
34	SUMATERA UTARA	157	16	125	48	45	128	27	146
	Grand Total	1980	204	1267	917	614	1570	460	1724

Lampiran 9. Pemanfaat Data di Rumah DataKu Pro PN berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	Pemerintah		Akademis		Swasta		Lainnya	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	ACEH	95	2	54	43	60	37	26	71
2	BALI	36	2	21	17	18	20	6	32
3	BANTEN	46	2	14	34	12	36	14	34
4	BENGKULU	48	2	24	26	27	23	18	32
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	60	2	37	25	13	49	22	40
6	DKI JAKARTA	27	3	9	21	8	22	6	24
7	GORONTALO	29	5	10	24	7	27	9	25
8	JAMBI	85	6	44	47	47	44	40	51
9	JAWA BARAT	137	20	41	116	28	129	65	92
10	JAWA TENGAH	89	13	22	80	26	76	31	71
11	JAWA TIMUR	333	25	108	250	87	271	48	310
12	KALIMANTAN BARAT	27	5	12	20	9	23	11	21
13	KALIMANTAN SELATAN	23	3	7	19	4	22	11	15
14	KALIMANTAN TENGAH	27	1	19	9	19	9	10	18
15	KALIMANTAN TIMUR	31	1	11	21	10	22	10	22
16	KALIMANTAN UTARA	20		2	18	2	18	5	15
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	12	2	6	8	4	10	6	8
18	KEPULAUAN RIAU	19	2	7	14	9	12	6	15
19	LAMPUNG	43	2	7	38	8	37	12	33
20	MALUKU	21	3	10	14	7	17	12	12
21	MALUKU UTARA	47	1	17	31	3	45	19	29
22	NUSA TENGGARA BARAT	59	7	9	57	4	62	12	54
23	NUSA TENGGARA TIMUR	34	11	4	41	3	42	12	33
24	PAPUA	62	5	47	20	19	48	21	46
25	PAPUA BARAT	19	1	18	2	17	3	2	18
26	RIAU	17	1	5	13	6	12	3	15
27	SULAWESI BARAT	45	1	15	31	11	35	14	32
28	SULAWESI SELATAN	74	2	8	68	13	63	23	53
29	SULAWESI TENGAH	11	2	4	9	3	10	5	8
30	SULAWESI TENGGARA	74	11	17	68	19	66	35	50
31	SULAWESI UTARA	31	2	6	27	7	26	9	24
32	SUMATERA BARAT	125	4	88	41	49	80	25	104
33	SUMATERA SELATAN	52	4	22	34	16	40	8	48
34	SUMATERA UTARA	167	6	32	141	37	136	35	138
	Grand Total	2025	159	757	1427	612	1572	591	1593